

Bab

11

Globalisasi, Liberalisasi Perdagangan dan Faktor Produksi

Materi Minggu 11

Globalisasi, Liberalisasi Perdagangan dan Faktor Produksi

11.1. Liberalisasi Perdagangan dan Proteksi

Analisa kebijakan perdagangan internasional (tarif dan nontarif) merupakan penyimpangan dari perdagangan bebas. Memang banyak alasan (apakah karena internasional maupun kelompok) mengapa diberlakukan kebijaksanaan tarif maupun nontarif meskipun disadari bahwa keuntungan akan banyak diperoleh apabila perdagangan itu bebas. Dalam bab ini akan dianalisa keadaan di mana perdagangan itu dilakukan dengan bebas atas dasar nondiskriminasi atau global.

Depresi dunia tahun 1930-an telah menyebabkan banyak negara melakukan tindakan proteksi. Dalam bukunya, *Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi*, Prof. Dr. R. Hendra Halwani, M.A. (2005) mengatakan bahwa proteksi adalah upaya pemerintah mengadakan perlindungan pada industri-industri domestik terhadap masuknya barang impor dalam jangka waktu tertentu. Proteksi bertujuan melindungi, membesarkan, atau mengecilkan kelangsungan industri dalam negeri yang berlaku dalam perdagangan umum. Setiap negara berjuang untuk mengurangi pengaruh jelek perkembangan ekonomi dunia dengan mengurangi ketergantungan dengan luar negeri melalui tindakan-tindakan yang bersifat protektif. Amerika Serikat merupakan negara yang paling berpengaruh pada waktu itu, melalui *Smoot-Howley tariff* mengenakan tarif terhadap ekspornya (sebanyak ± 25.000 jenis barang). Tindakan ini tentu saja kemudian diikuti oleh negara lain sehingga perdagangan dunia menjadi tidak bebas.

Namun selang beberapa tahun, Amerika Serikat memulai dengan *Reciprocal Agreement Act* yang membolehkan Presiden mengadakan perundingan tentang penurunan tarif. Setelah berakhirnya perang dunia II, usaha ke arah liberalisasi perdagangan makin mendapat angin segar.

Tahun 1948 dalam *Havana charter* dikandung maksud untuk membentuk *International Trade Organization* (ITO) yang bertujuan mengurangi hambatan dalam perdagangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun usaha ini banyak mendapat tantangan politik sehingga Amerika Serikat menolaknya. Sebagai usaha sementara, maka pada saat itu diciptakan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Karena kegagalan ITO maka GATT menjadi badan penyangga yang penting dalam badan dunia untuk membangun kembali sesudah perang dunia II. Dua badan dunia lainnya adalah IMF dan IBRD (*World Bank*). GATT adalah suatu persetujuan multilateral yang menentukan peraturan-peraturan bagi pelaksanaan perdagangan internasional. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu perdagangan internasional yang terbuka, bebas dan kompetitif. Jumlah anggota sampai dengan tahun 1988 ada 94 *contracting parties* yakni peserta penandatanganan penuh dengan lebih dari 30 anggota luar biasa yang menerapkan peraturan-peraturan GATT dalam perdagangan mereka.

Prinsip dasar yang utama dari GATT tersebut adalah apa yang disebut dengan *Most Favoured Nation* (MFN) yakni mengharuskan setiap *contracting parties* memberikan perlakuan yang sama dalam kebijaksanaan perdagangan internasional kepada negara penandatanganan yang lain. Kelonggaran yang diberikan kepada negara lain atas dasar perjanjian bilateral haruslah diberikan pula kepada semua anggota yang lain tanpa perjanjian terlebih dahulu. Di samping itu, GATT sejauh mungkin menggunakan tarif sebagai hambatan perdagangan dan bukan nontarif. Apabila terjadi perselisihan dapat diselesaikan melalui proses konsultasi/konsiliasi secara terus-menerus. Dengan demikian GATT di samping merupakan kumpulan peraturan juga merupakan forum untuk mencapai konsiliasi/menyelesaikan perselisihan perdagangan.

Perubahan-perubahan yang besar tidak terjadi dalam perdagangan internasional semenjak GATT berdiri dan ini memberikan tekanan terhadap bekerjanya mekanisme GATT sehingga perlu perubahan di sana-sini.

Masalah yang dirasa sangat mendesak adalah prosedur penyelesaian perselisihan (*dispute settlement*) dan pengawasan (*surveillance*), dan mungkin diperlukan satu badan internasional yang mengawasi bekerjanya mekanisme GATT serta menjamin bahwa *contracting parties* memenuhi kewajibannya.

Hingga tahun 1989 putaran/perundingan GATT telah berjalan sebanyak 8 kali, yakni:

- 1) Tahun 1947 : Jenewa
- 2) Tahun 1949 : Annecy
- 3) Tahun 1950/1951 : Torquay
- 4) Tahun 1955/1956 : Jenewa
- 5) Tahun 1961/1962 : Jenewa (disebut *Dillon Round*)
- 6) Tahun 1963/1967 : Jenewa (disebut *Kennedy Round*)
- 7) Tahun 1963/1979 : Jenewa (disebut *Tokyo Round*)
- 8) Tahun 1986 : Uruguay (disebut *Uruguay Round*)

Perundingan pertama di Jenewa tahun 1947 ditandatangani oleh negara-negara yang ikut merumuskan *Havana charter* berisi pemotongan tarif di mana pada saat itu tarif merupakan hambatan yang cukup besar dalam perdagangan internasional. Negara-negara yang selanjutnya di Annecy, Torquay dan Jenewa terutama menyangkut masalah pengurangan tarif dengan negara-negara yang telah menyatakan minatnya bergabung dalam GATT.

Dillon Round tahun 1961/1962 berisi keharusan *Customs Union* dan daerah perdagangan bebas (*free trade area*) diperiksa oleh GATT untuk menjamin bahwa pendiriannya tidak menimbulkan proteksi bagi negara di luar anggota *customs union* dan *free trade area*. Bersamaan ini diusulkan oleh Douglas Dillon, Wakil Menlu AS tentang penurunan tarif.

Kennedy Round mencakup pemotongan tarif yang bersifat multilateral dan berlaku bagi semua pihak (*across the board*) untuk produk-produk industri. Di samping itu dibicarakan pula tentang *anti dumping code* yang berisi tentang arti dumping dan faktor-faktor yang harus diperhitungkan dalam menilai akibat negatif dumping terhadap industri dalam negeri. Untuk itu suatu negara diperkenankan mengenakan bea khusus (*anti dumping*) atas barang impor.

Tokyo Round menghasilkan serangkaian *codes* tentang berbagai masalah, seperti tentang standar teknis, lisensi impor, dumping, subsidi serta beberapa komoditi (seperti daging dan susu). Kode-kode ini hanya merupakan tambahan dari *general agreement* sehingga setiap negara *contracting* bebas untuk menganut/memilih kode mana yang akan diikuti.

Pada bulan September 1986, putaran GATT diselenggarakan di sebuah kota bernama Punta del Este di Uruguay, yang kemudian dikenal dengan *Uruguay Round*. Deklarasi yang dihasilkan meliputi dua bagian. Pertama, deklarasi yang menyangkut tentang barang yang menjamin tidak akan ada tindakan proteksionis. Kedua, deklarasi yang menyangkut perdagangan jasa (*trade in services*). Banyak negara berkembang yang tidak menyetujui liberalisasi di dalam perdagangan jasa, mengingat sektor jasa mereka belum kuat. Perundingan ini diawasi oleh *Trade Negotiations Committee* (TNC). Di bawah TNC ini, ada dua komite sesuai dengan isi deklarasi Punta del Este, yakni *Group of Negotiations on Goods* (GNG) dan *Group of Negotiations on Services* (GNS).

Akhirnya, dapat disebutkan bahwa tujuan utama perundingan GATT, seperti juga yang telah disepakati di Punta del Este adalah:

- a) Untuk mencapai liberalisasi dan perluasan perdagangan dunia demi kepentingan semua negara, khususnya negara berkembang.
- b) Memperkuat dan meningkatkan peranan GATT dan mengusahakan jangkauan perdagangan dunia yang lebih luas di bawah peraturan-peraturan multilateral yang telah disepakati.
- c) Meningkatkan daya tanggap sistem GATT terhadap lingkungan ekonomi dunia yang selalu berubah melalui koordinasi yang lebih erat antara GATT dengan badan-badan internasional.
- d) Memupuk kerja sama yang sudah ada pada tingkat nasional maupun internasional untuk memperkuat hubungan antara kebijaksanaan perdagangan dengan kebijaksanaan ekonomi lainnya.

Disepakati bahwa perundingan-perundingan dilaksanakan dengan cara sejelas mungkin (transparan) dan semua *contracting parties* sepakat tentang prinsip-prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang (*Differential and Most Favourable Treatment Reciprocity and Fuller Participation of Developing Countries*).

11.2. Faktor Produksi Tenaga Kerja, Modal SDM dan Teknologi

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam suatu negara bersifat fluktuatif, kadang mengalami kenaikan dan kadang mengalami penurunan. Kondisi pertumbuhan dan pembangunan yang bersifat fluktuatif atau berubah-ubah tersebut disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Faktor-faktor yang dimaksud di sini antara lain:

- a) Tenaga Kerja/Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM menjadi faktor yang sangat penting terhadap tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan ekonomi. Hal ini karena dalam suatu proses produksi, peran sumber daya manusia sangat vital yaitu sebagai tenaga kerja dan sekaligus sebagai pengusaha yang bertugas mengombinasikan beberapa faktor produksi dalam kegiatan menghasilkan barang maupun jasa. Selain itu, sumber daya manusia juga berperan dalam penciptaan teknologi baru dan modern untuk mendukung pekerjaan dan mengoptimalkan hasil produksi. Oleh karena itu, jika suatu negara menginginkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pembangunan ekonomi yang tinggi, maka negara tersebut harus meningkatkan kualitas SDM diantaranya dapat dilakukan dengan mengembangkan kualitas ilmu pengetahuan, kualitas teknologi, memberikan pelatihan keterampilan, serta membina sikap dan pola pikir yang positif.

- b) Modal

Apabila suatu negara ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan ekonomi maka modal sangat diperlukan, baik modal berupa barang maupun modal berupa uang. Dalam negara berkembang, pada umumnya mempunyai ketersediaan modal yang relatif rendah. Tingkat pembentukan modal yang rendah disebabkan oleh kemampuan menabung yang masih rendah. Kemampuan menabung yang rendah disebabkan oleh rendahnya pendapatan. Pendapatan yang rendah disebabkan oleh tingkat produktivitas yang masih rendah. Tingkat produktivitas yang rendah disebabkan oleh tingkat pembentukan modal yang masih rendah, sehingga kegiatan investasi tidak dapat berkembang. Demikian seterusnya sehingga membentuk suatu lingkaran setan atau lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle*) yang tidak ada putusnya dan saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Lingkaran setan harus diputuskan agar suatu negara dapat terbebas dari kemiskinan, cara

memutuskannya adalah dengan melakukan suatu hentakan besar, hentakan tersebut diantaranya dengan melakukan investasi yang lebih besar, meningkatkan keahlian dan keterampilan penduduk serta menkan laju pertumbuhan penduduk dengan program Keluarga Berencana (KB).

c) Teknologi

Teknologi merupakan salah satu faktor penentu kenaikan atau penurunan pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan ekonomi. Hal ini karena dengan penguasaan teknologi yang baik maka akan memudahkan suatu negara dalam mengolah sumber daya alam yang dimiliki negara tersebut sehingga dapat mencapai tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang tinggi. Dengan menggunakan beberapa teknologi modern, maka proses produksi dapat dilakukan dengan lebih cepat, dapat memproduksi barang dan jasa lebih banyak dan lebih baik serta dapat menghemat biaya produksi.

11.3. Perpindahan Faktor Produksi antar 2 Negara

Teori perdagangan klasik menganggap bahwa faktor produksi tidak secara bebas pindah dari satu negara ke negara lain. Meskipun anggapan ini ditiadakan maka prinsip teori perdagangan klasik itu masih tetap berlaku. Namun apabila analisa perdagangan itu dilakukan dengan memperhatikan waktu (dinamis) maka akan terpengaruh adanya perpindahan faktor produksi. Faktor produksi akan pindah dari tempat yang harganya murah ke tempat yang harganya lebih mahal, dan akhirnya harga faktor produksi akan cenderung sama di berbagai tempat. Perpindahan faktor produksi ini dapat dianggap sebagai pengganti perdagangan barang. Misalnya, satu negara yang tidak memiliki faktor produksi tenaga kerja yang banyak dapat mendatangkan (mengimpor) tenaga kerja atau mengimpor barang yang padat tenaga kerja dari negara yang banyak memiliki tenaga kerja, tentu saja kedua pilihan ini akan membawa implikasi ekonomi yang berbeda bagi negara penerima dan pemberi.

Migrasi faktor tenaga kerja antarnegara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi saja, tetapi juga oleh faktor nonekonomi seperti misalnya agama, ras dan politik. Untuk faktor ekonomi biasanya migrasi didasarkan pada perhitungan pendapatan dan biaya. Harapan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi atau standar hidup yang lebih baik merupakan tujuan pindah ke tempat/negara lain. Mereka meninggalkan tempat yang produktivitasnya lebih tinggi mungkin dikarenakan tenaga kerjanya dikombinasikan dengan faktor produksi lainnya yang lebih banyak dan baik kualitasnya.

Tetapi migrasi tidak berarti tanpa biaya. Untuk pindah, baik orangnya, keluarganya maupun barang miliknya tentu perlu biaya dan waktu. Di samping itu ada pula biaya yang tidak langsung baik berupa ketidakenakan maupun proses penyesuaian dengan lingkungan sosial, budaya bahasa dan sebagainya. Namun apabila menurut perhitungannya manfaat yang diperoleh lebih besar dari biayanya, migrasi akan terjadi.

Secara demografis, efek yang nampak dari migrasi adalah adanya apa yang disebut "*brain drain*". *Human capital* tidak dapat dipisahkan dari orangnya yang pindah. Tentu saja negara yang ditinggalkan akan rugi, sebaliknya yang kedatangan akan untung.

Kebijaksanaan immigrasi berbeda antara satu negara dengan negara lain. Satu negara yang sudah terlalu banyak penduduknya tidak akan banyak mendorong immigrasi. Sebaliknya negara yang kurang penduduknya mendorong immigrasi secara selektif, terutama untuk tenaga kerja yang berkualitas.

Tentu saja dalam kenyataan masih banyak faktor yang mempengaruhi perpindahan faktor produksi antarnegara; seperti misalnya perbedaan dalam teknik produksi, perbedaan dalam pola permintaan, dan kenyataannya tenaga kerja tidak sepenuhnya mudah pindah.

Seperti halnya tenaga kerja, modal merupakan sumber pertumbuhan ekonomi suatu negara, baik modal yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Namun bedanya, modal relatif lebih mudah pindah dari satu negara ke negara lain dengan tujuan memperoleh pendapatan. Tentu saja perpindahan ini harus didukung adanya kebijaksanaan pemerintah yang tidak melarang arus modal masuk dan keluar.

Untuk negara penerima pinjaman luar negeri atau investasi dari luar negeri dapat mendorong pertumbuhan. Modal asing sangat perlu manakala negara belum bisa membuat barang modal itu sendiri atau kalau dibuat sendiri biayanya mahal. Meskipun barang modal itu harus diimpor tidak berarti hanya bisa dibiayai dengan pinjaman luar negeri saja, tetapi juga dapat dibiayai dari sumber dalam negeri yang diarahkan untuk produksi ekspor yang dengan devisa yang diperoleh dapat dipakai untuk membiayai impor barang modal.

Untuk menjelaskan efek modal luar negeri terhadap produksi dan pendapatan, secara sederhana dapat kita anggap bahwa modal luar negeri (uang) tersebut digunakan untuk membeli barang modal dari luar negeri; dan barang modal tersebut sama baiknya antara dalam maupun luar negeri. Masalahnya adalah penentuan besarnya pinjaman luar negeri yang harus diambil. Untuk pinjaman luar negeri, negara peminjam harus membayar biaya bunga. Apabila pinjaman luar negeri ini dapat mendorong pertumbuhan, kontribusinya melebihi biaya, maka secara ekonomis tidak menimbulkan masalah.

Misalkan tenaga kerja, teknologi dan faktor produksi lain tidak berubah maka berdasar hukum hasil petambahan produksi yang menurun (*diminishing return*) tambahan modal akan mengakibatkan tambahan hasil yang semakin menurun. Sampai satu titik tertentu sama dengan biaya pinjaman. Dalam keadaan demikian dikatakan bahwa daya absorpsi yang berkaitan dengan modal luar negeri terbatas.

Dari uraian di atas nampak bahwa ekonomi dunia akan memperoleh keuntungan dengan adanya transfer faktor produksi (tenaga kerja, modal, dll) yang ini mirip dengan keuntungan yang timbul karena perdagangan internasional (barang) seperti yang dikemukakan oleh teori klasik. Satu negara yang tidak memiliki faktor produksi tenaga kerja dalam jumlah banyak dapat mendatangkan tenaga kerja dari negara lain atau mengimpor barang yang padat tenaga kerja. Kedua cara ini akan dapat mendatangkan keuntungan. Sebaliknya negara yang banyak memiliki modal dapat menjual/mengekspor/barang yang padat modal atau mentransfer modal untuk memperoleh pendapatan di luar negeri. Output dunia akan naik dengan adanya realokasi faktor produksi dari negara yang nilai produk marjinalnya rendah ke negara yang nilai produk marjinalnya lebih tinggi, apakah melalui perdagangan barang atau transfer faktor produksi. Seperti pada perdagangan barang perpindahan faktor produksi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan antarnegara dan harga faktor produksi cenderung sama di berbagai negara (*factor price equalization*).

11.4. Globalisasi Ekonomi, Pasar Bebas dan Blok Perdagangan

Adam Smith dalam tulisannya *An Inquiry into The Wealth of Nation* atau yang dikenal dengan *The Wealth of Nation* (1776) mengatakan, secara alami bahwa setiap manusia akan selalu memperoleh dorongan untuk dapat meningkatkan kehidupannya agar lebih baik bagi dirinya sendiri. Selanjutnya dijelaskan bahwa masyarakat yang memungkinkan bagi dirinya sendiri. Selanjutnya dijelaskan bahwa masyarakat yang memungkinkan warganya melakukan hal-hal yang baik bagi dirinya sendiri. Inilah dasar falsafah individualisme yang menjadi landasan prinsip demokrasi ekonomi pasar dan hak asasi manusia. Falsafah individualisme ini dalam perjalanannya memenangkan dari segala pertarungan dengan macam-macam falsafah pemikiran ekonomi, terutama dengan pemikiran komunisme. Posisi falsafah individualisme ini lebih memiliki sifat universal dan manusiawi dibandingkan dengan komunisme yang dikembangkan oleh Karl Marx.

Pemikiran individualisme yang merangsang setiap aktivitas ekonomi bergerak secara bebas merupakan dasar bagi perkembangan ekonomi pasar sehingga berkembang menjadi perdagangan bebas antarindividu, antarkelompok, antarmasyarakat, antardaerah hingga antarnegara.

Perkembangan ekonomi dunia yang begitu pesat telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan dan mempertajam persaingan yang menambah semakin rumitnya strategi pembangunan yang mengandalkan ekspor di satu pihak, hal ini merupakan tantangan dan kendala yang membatasi. Di pihak lain, hal tersebut merupakan peluang baru yang dapat dimanfaatkan untuk keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional.

Perekonomian dunia mengalami perubahan sejak dasawarsa 1970-an hingga tahun 2000-an yang bersifat mendasar atau struktural dan mempunyai kecenderungan jangka panjang atau konjungtural. Perkembangannya sangat menarik, yang istilahnya sangat populer belakangan ini adalah 'globalisasi'.

Gejala globalisasi terjadi dalam kegiatan finansial, produksi, investasi, dan perdagangan yang kemudian memengaruhi tata hubungan ekonomi antar bangsa. Proses globalisasi itu telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan antarnegara, bahkan menimbulkan proses menyatunya ekonomi dunia, sehingga 'batas-batas antarnegara dalam berbagai praktik dunia usaha/bisnis seakan-akan dianggap tidak berlaku lagi'.

Selain globalisasi, perubahan yang cukup menonjol adalah kecenderungan terpisahnya kegiatan ekonomi primer dari ekonomi industri, yang berarti bahwa penggunaan material dalam industri makin sedikit. Dari perkembangan itu terlihat bahwa proses kegiatan ekonomi produksi industri pengolahan dalam perkembangannya tampak makin melemah kaitannya ke belakang, sehingga perkembangannya tidak banyak menimbulkan pengaruh yang serupa pada produksi barang primer.

Dampak yang terjadi adalah merosotnya harga komoditi primer yang disebabkan oleh permintaan yang lesu, merosotnya nilai tukar perdagangan (*term of trade*) dari sektor pertanian, sejalan dengan produksi yang terus-menerus meningkat karena teknologi baru. Kaitan yang melemah juga tampak pada perkembangan industri dengan penciptaan kesempatan kerja sebagai akibat robotisasi dan melemahkan kaitan ekonomi moneter perbankan dengan ekonomi riil (sektor produksi dan perdagangan).

Pada umumnya, negara di dunia menghadapi perkembangan tersebut dengan melakukan berbagai langkah penyesuaian yang sebagian cenderung bersifat proteksionistis. Timbulnya berbagai blok perdagangan yang pada dasarnya melanggar ketentuan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) atau *World Trade Organization* (WTO) atau diterapkannya peraturan perundang-undangan yang jelas-jelas proteksionistis, semuanya menunjukkan gejala tersebut.

a) Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) atau *European Economic Community* (EEC)

Adalah PM Inggris, Winston Churchill yang pertama kali melontarkan ide perlu dibentuknya Dewan Eropa. Dalam pidatonya di Zurich pada tanggal 19 September 1946, Churchill mengusulkan pembentukan dua organisasi, yakni Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) dan Dewan Eropa. Kita harus menciptakan semacam *United State of Europe*, demikian yang dia sampaikan. Langkah pertama yang bisa ditempuh sebelum menuju ke sana adalah membentuk Dewan Eropa. Dalam hal ini, Perancis dan Jerman diharapkan mengambil inisiatif. Inggris Raya, negara-negara persemakmuran, Amerika, dan diharapkan juga Uni Soviet bisa menjadi sahabat dan pelindung dari 'Eropa Baru' yang mendahulukan hak untuk hidup dan kemakmuran.

Pembentukan NATO tampaknya lebih mudah karena pada tanggal 4 April 1949, pakta pertahanan tersebut resmi terbentuk. Dewan Eropa sendiri mulai muncul 5 Mei 1949. Namun, dalam perjalanannya yang sangat panjang dan baru 17 Februari 1992 di Maastrich, Belanda, disepakati secara lebih nyata penyatuan Eropa dalam bidang ekonomi, moneter dan politik.

Sejak kesepakatan Maastrich, boleh dikatakan tidak ada lagi pembatasan lalu lintas barang maupun orang di antara negara-negara Uni Eropa. Setiap orang boleh bekerja di mana saja yang mereka inginkan. Barang-barang produksi juga bebas diperdagangkan di antara negara-negara anggota Uni Eropa.

Dalam Perjanjian Roma disepakati mendirikan *European Economic Community* (EEC) atau MEE, yang mengharuskan para anggota memenuhi persyaratan berikut.

- 1) Menurunkan tarif, kuota, dan hambatan lain pada perdagangan intranegara-negara Eropa.
- 2) Menaati tarif eksternal umum dari negara-negara di luar MEE.
- 3) Menjalankan aliran faktor produksi dalam MEE.
- 4) Mengharmoniskan kebijakan pajak dan moneter serta kebijakan keamanan sosial.
- 5) Menentukan kebijakan umum untuk pertanian, transportasi, dan persaingan industri.

Tarif eksternal umum MEE untuk setiap produk dihitung sebagai rata-rata aritmetika dari tarif tiap-tiap negara anggota. Penetapan tarif dan pengukuran hambatan perdagangan intra-MEE harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga memberi cukup waktu bagi para produsen untuk mengubah biaya *input* dan harga produk yang bersaing. “Periode Transisi” itu berlangsung minimal 12 tahun dan maksimal 15 tahun. Dalam kenyataannya, banyak produsen yang merasa mudah untuk melakukan perubahan tersebut dan kegiatan tersebut sudah selesai sebelum waktu yang ditentukan.

b) *North America Free Trade Agreement* (NAFTA)

Penyusunan *North America Free Trade Agreement* (NAFTA) terjadi pada tanggal 12 Agustus 1992, disetujui dan ditandatangani di Washington DC oleh wakil pemerintah AS, Kanada, dan Meksiko. Pendirian NAFTA dimaksudkan untuk menghapus hambatan-hambatan perdagangan, menciptakan persaingan yang wajar, serta meningkatkan investasi antarnegara anggota. Hal ini dijadikan dasar pengembangan kerja sama regional dan multilateral di masa mendatang.

Ketentuan-ketentuan dalam NAFTA tidak bertentangan dengan aturan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), kesepakatan perdagangan multilateral antar-penandatanganan (anggota) dewasa ini terdiri dari 108 negara. GATT/WTO tidak melarang pendirian kawasan perdagangan bebas antarnegara, karena kesepakatan tersebut untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan yang merupakan prinsip yang mendasari perjuangan GATT/WTO, meskipun hanya berlaku bagi negara-negara anggota.

GATT/WTO mempersyaratkan bahwa pembentukan kawasan perdagangan bebas tidak boleh dilakukan dengan menimbulkan hambatan baru bagi negara-negara bukan anggota. Jadi, perlakuan negara-negara anggota terhadap yang bukan anggota tidak boleh lebih memberatkan dibandingkan dengan ketentuan sebelum pembentukan blok perdagangan.

Kesepakatan pendirian NAFTA meliputi program penghapusan tarif bea masuk perdagangan komoditi pertanian, barang-barang otomotif, tekstil bahan pakaian jadi, energi dan petrokimia, serta jasa-jasa. Ketentuan-ketentuan mengenai antidumping, *countervailing*, angkutan darat, investasi, hak cipta, dan prosedur penyelesaian sengketa.

Dalam hal tarif bea masuk, NAFTA menentukan untuk kebanyakan yang memenuhi ketentuan sebagai barang asal Amerika Utara dilakukan penghapusan secara progresif dalam waktu 15 tahun atau 10 tahun. Sedangkan untuk barang-barang yang dianggap sensitif, penghapusannya akan dilakukan dalam waktu 15 tahun. Barang-barang yang sensitif ini misalnya, sepatu kanvas, keramik, tas, dan berbagai produk pertanian, seperti kacang tanah, *orange juice*, *concentrate*, asparagus, dan sebagainya.

Pembentukan kawasan perdagangan bebas memang di satu pihak dapat menimbulkan peningkatan perdagangan, paling tidak antarnegara anggota, bahkan kalau kawasan tersebut menjadi lebih bertumbuh, maka peningkatan perdagangan juga dapat timbul antara kawasan ini dengan negara-negara di luarnya (*trade creation*). Akan tetapi, karena peningkatan perdagangan antarnegara anggota ini sering kali bukan merupakan tambahan baru, melainkan menggantikan yang lama, maka dampak yang terjadi adalah suatu substitusi saja, suatu pengalihan perdagangan dari mitra lama ke luar kawasan, ke mitra baru anggota kawasan (*trade diversion*).

Dalam bentuk sekarang, seperti halnya dengan NAFTA, karena kesepakatan pembentukan blok perdagangan tersebut mencakup pula pembebasan perdagangan jasa, investasi dan berbagai hal lain, maka kedua dampak tersebut mungkin lebih substansial lagi, baik yang bersifat menumbuhkan perdagangan maupun yang mengalihkannya.

c) *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*

Awal munculnya APEC dimulai dari adanya pergeseran kekuatan ekonomi dunia dari trans-Atlantik ke trans-Pasifik. Konsekuensinya adalah gagasan pembentukan kawasan ekonomi pun berkembang pula ke wilayah Asia Pasifik. Meski kekuatan ekonomi kawasan trans-Atlantik ingin dipertahankan Eropa. Namun demikian, dengan munculnya ‘*The East Asian Miracle*’ (Keajaiban Asia Timur) telah menyebabkan pergeseran itu tidak dapat dihindarkan sama sekali.

Berbagai pemikiran mengenai pembentukan suatu badan kerja sama ekonomi di kawasan Asia Pasifik sebenarnya telah lama berkembang, setidak-tidaknya sejak 1967. Namun, gagasan tersebut hanya muncul dari berbagai organisasi nonpemerintah. Sebaliknya, belum ada pemikiran di kalangan pemerintah mengenai pembentukan suatu badan “resmi”, mengenai masih ada berbagai konflik kepentingan di antara negara-negara Asia Pasifik.

Melalui berbagai diskusi dan dorongan yang sangat intensif dari PM Australia, Bob Hawke, suatu pertemuan penjajakan dalam usaha pembentukan APEC berhasil dilakukan di Canberra tahun 1989. Dalam pertemuan itu, Australia berusaha menempatkan ASEAN sebagai ‘inti’ dan dilingkungi negaranegara industri di kawasan Pasifik; Jepang, Amerika Serikat, Kanada, dan Selandia Baru. Selain itu, di antara kelompok NIEs (negara-negara industri baru), hanya Korea yang diundang hadir (selain Singapura dalam kelompok ASEAN) sedangkan ‘ketiga Cina’ belum diikutsertakan sama sekali. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik di antara ‘ketiga Cina’. Australia sendiri bertindak sebagai tuan rumah.

Ketika APEC dibentuk di Canberra (1989), negara-negara ASEAN dan non-ASEAN berbanding 1:1. Dengan kata lain, enam negara ASEAN (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand) berhadapan dengan Australia, Kanada, Jepang, Korea, Selandia Baru, dan Amerika Serikat.

APEC merupakan suatu institusi yang cukup unik, dengan mengombinasikan berbagai “konflik” politik dan kerja sama ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Politik dan ekonomi tidak berjalan pada jalan yang sama. Namun tidak pula dapat disangkal, peranan ekonomi telah jauh lebih penting dari

kepentingan politik dalam perkembangan pembangunan dewasa ini. Sejak APEC didirikan secara informal dalam pertemuan Canberra (1989), berbagai bentuk pertemuan telah diadakan di negara anggota.

APEC merupakan sebuah badan konsultasi dan sama sekali bukan bersifat forum negosiasi, dapat dibayangkan betapa sukarnya mencari isu-isu yang perlu dibincangkan dalam lingkungan APEC. Semula, isu-isu yang dibahas lebih bersifat teknis-sektoral dalam usaha mencari bentuk kerja sama ekonomi antarnegara anggota. Namun, sekitar dua tahun kemudian, terdapat pula dorongan untuk mengkaji masalah-masalah yang lebih berorientasi terhadap pola kebijakan ekonomi, perdagangan dan investasi, walaupun hal ini tidak begitu disenangi oleh beberapa negara anggota.

Program kerja APEC, dengan demikian, mencakupi program operasional dan program administratif. Program operasional merupakan program kerja sama ekonomi yang sedang dikembangkan dewasa ini. Program administratif melalui sekretariat APEC lebih bersifat mendukung aktivitas program operasional. Program operasional dikembangkan melalui empat bidang kajian berikut.

- 1) Kajian ekonomi.
- 2) Liberalisasi perdagangan.
- 3) Investasi, transfer teknologi dan pengembangan SDM.
- 4) Kerja sama sektoral, seperti pariwisata, energi, promosi perdagangan, masalah lingkungan hidup, serta pembangunan prasarana.

Dari segi pembentukan suatu blok perdagangan, makin besar variasi keadaan ekonomi yang mencerminkan daya saing masing-masing negara, makin sukar pula dicapai kesepakatan penghapusan rintangan-rintangan perdagangan yang oleh masing-masing negara dipergunakan untuk memberikan perlindungan pada ekonomi masing-masing. Negara yang daya saingnya lemah tentu menghendaki perlindungan yang lebih besar dibandingkan dengan yang daya saingnya kuat. Karena itu, makin besar perbedaan kondisi ekonomi antarpara anggota negara lain yang ditunjukkan oleh GNP per kepala, makin sulit pula dibentuk suatu blok perdagangan.

Dalam kerangka hubungan perdagangan internasional, berbagai upaya masih dijalankan agar usaha memperbaiki sistem perdagangan dunia melalui perundingan perdagangan multilateral dalam kerangka perundangan dalam *Uruguay Round* dapat segera memberi hasil positif, terciptanya perdagangan dunia yang bebas, adil dan terbuka. Globalisasi ekonomi ditandai dengan makin tipisnya batas-batas investasi atau pasar secara nasional, regional ataupun internasional. Hal itu disebabkan oleh adanya hal-hal berikut ini.

- 1) Komunikasi dan transportasi yang semakin canggih.
- 2) Lalu lintas devisa yang semakin bebas.
- 3) Ekonomi negara yang makin terbuka.
- 4) Penggunaan secara penuh keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif tiap-tiap negara.
- 5) Metode produksi dan perakitan dengan organisasi manajemen yang makin efisien.
- 6) Semakin pesatnya perkembangan perusahaan multinasional di hampir seantero dunia.

SOAL-SOAL LATIHAN

Silanglah salah satu di antara huruf A, B, C dan D, yang menurut pendapat Anda paling tepat dihubungkan dengan bagian kalimat yang mendahuluinya.

1. Perundingan pertama *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) diselenggarakan di ...

A. Jenewa	C. Tokyo
B. Uruguay	D. Annecy
2. Berikut ini yang merupakan penggagas terbentuknya *Dillon Round* adalah ...

A. Bob Hawke	C. John F. Kennedy
B. Douglas Dillon	D. Winston Churchill
3. Berikut ini yang merupakan penggagas terbentuknya *Kennedy Round* adalah ...

A. Bob Hawke	C. John F. Kennedy
B. Douglas Dillon	D. Winston Churchill
4. Berikut ini yang merupakan penggagas terbentuknya *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) adalah ...

A. Bob Hawke	C. John F. Kennedy
B. Douglas Dillon	D. Winston Churchill
5. Berikut ini yang memprakarsai terbentuknya *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) adalah ...

A. Bob Hawke	C. John F. Kennedy
B. Douglas Dillon	D. Winston Churchill
6. APEC terbentuk pada tahun ...

A. 1988	C. 1990
B. 1989	D. 1991
7. Berikut ini merupakan penanda terjadinya globalisasi ekonomi dunia, kecuali ...
 - A. Ekonomi negara makin terbuka
 - B. Komunikasi dan transportasi semakin canggih
 - C. Investasi, transfer teknologi dan pengembangan SDM
 - D. Semakin pesatnya perkembangan perusahaan multinasional di hampir seantero dunia
8. Berikut ini merupakan isi dari perundingan *Tokyo Round* adalah ...
 - A. Masalah pengurangan tarif dengan negara-negara yang telah menyatakan minatnya bergabung dalam GATT
 - B. Pemotongan tarif yang bersifat multilateral dan berlaku bagi semua pihak (*across the board*) untuk produk-produk industri
 - C. Keharusan *Customs Union* dan daerah perdagangan bebas (*free trade area*) diperiksa oleh GATT untuk menjamin bahwa pendiriannya tidak menimbulkan proteksi bagi negara di luar anggota *customs union* dan *free trade area*.
 - D. Penentuan standar teknis, lisensi impor, dumping, subsidi serta beberapa komoditi (seperti daging dan susu)
9. Tokyo Round dihasilkan perundingan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang diselenggarakan di ...

A. Jenewa	C. Tokyo
B. Uruguay	D. Annecy
10. NATO terbantu pada tanggal ...

A. 5 Mei 1949	C. 17 Februari 1992
B. 4 April 1949	D. 12 Agustus 1992

Jawablah soal essay di bawah ini, yang menurut pendapat Anda benar.

1. Jelaskan apa itu *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT)?
2. Apa isi dari *Havana Charter*?
3. Sebutkan contoh dari blok perdagangan? Minimal 5!
4. Jelaskan alasan awal mula APEC berdiri?
5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Liberalisasi Perdagangan?